



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 20 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Tiga SPPG Sidoarjo Diduga Gunakan Sertifikat Laik Abal-abal

SIDOARJO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menemukan dugaan penggunaan tiga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu oleh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen tersebut tidak ditemukan dalam sistem resmi saat dilakukan pengecekan oleh petugas.

Baca Tiga... Hal 19



TEMUKAN PELANGGARAN: Forkopimda Sidoarjo bersama BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di Sidoarjo kemarin (19/10).

KILAS DEWAN

Hibah di Pamekasan Macet 2 Tahun, Komisi IV Datang ke Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan melakukan sharing terkait penyaluran dana hibah yang macet kepada Pemkab Sidoarjo. Palsalnya, selama dua tahun terakhir dana hibah di Pamekasan belum bisa dicairkan. Saat ini pencariannya masih menunggu petunjuk Bupati.

Ketua Komisi IV Kabupaten Pamekasan, Yasin Halili, mengatakan tahun 2027 pun kemungkinan belum bisa dicairkan. Sebab ada atensi dari KPK sehingga hibah untuk masjid, musala, dan yayasan tidak bisa dicairkan.

"Bisa tidak bagus kalau terus tidak bisa dicairkan, sebab banyak masyarakat yang pasti sudah menunggu," ujarnya, Senin (19/10) kemarin, saat kunjungan kerja bersama eksekutif di Delta Karya Setda Sidoarjo. Dampaknya juga cukup serius. Kabag Kesra Pamekasan sampai-sampai juga dikabarkan mengundurkan diri kepada Bupati Pamekasan dan saat ini diganti Plt.

"Kami ditelepon terus oleh konstituen, mereka harap ada pencairan dana hibah," katanya.

Selama ini di Pamekasan, hibah untuk masjid dialokasikan sebesar Rp20 juta, musala Rp10 juta, dan yayasan Rp40 juta. Menanggapi hal itu, Plt Kabag Kesra Sidoarjo, Abdul Muid, mengatakan nilai hibah di Pamekasan hampir sama dengan di Kabupaten Sidoarjo. [kns.dre]

Pokir DPRD Diperketat, Harus Selaras Visi Bupati

Pendampingan untuk Memahami Mekanisme

KOTA-Ulusan aspirasi masyarakat melalui pokir-pokir (pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo bakal diawasi lebih ketat. Setidaknya lima pokir akan harus mengemukakan visi dan misi Bupati Sidoarjo.

Kalau ini bertujuan memastikan program yang diusulkan tidak sekedar mengkomodifikasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil), tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi pelaksanaan pokir DPRD Sidoarjo bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Senin (19/10) pagi.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, program-program yang diusulkan oleh pokir-pokir harus selaras dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo.

■ Ke Halaman 10

Bayar Rp 105 Juta, Pembeli Tak Tahu Rumah Berdiri di Aset Desa

Jaksa Usut Alih Fungsi TKD Damarsi

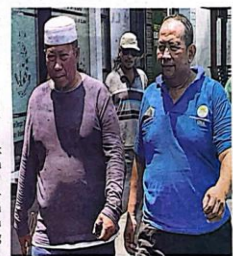
SIDOARJO - Penyelidikan kasus alih fungsi tanah desa (TKD) Damarsi jadi rumah kontrakan terus berlanjut. Kejari Sidoarjo memanggrubungi pembeli rumah petak di aset desa dan pemasok material bangunan kemarin (19/10). Ada keterangan baru yang didapat penyelidik.



Rencana, ada saksi lagi yang akan diperiksa.

Sigit Sambodo Kasi Pidus Kejari Sidoarjo tersendat dan masih berstatus sertifikat induk.

seluruh unit terjual. Dia mengaku tidak menaruh curiga karena kantor perusahaan pembangun berada tepat di sebelah lahan yang kini diposisikan. Saya juga bingung kalau memang bermasalah, kenapa selama hampir dua tahun tidak ada tanda-tanda? Tidak ada peringatan dari desa atau pemerintah," ujarnya. Soehagoro menyebut, saat ini terdapat 12 rumah yang telah dihuni warga. Para pembeli, menurut dia, telah melunasi pembayaran dengan harga berkisar Rp 90 juta hingga Rp 135 juta per



JAKSI SAKSI Pembeli rumah Sidoarjo Damarsi bersama koordinator warga Dusun di Sambi lahan dari Kantor Kejari Sidoarjo kemarin (19/10).

MISTERI ASET DESA JADI RUHAH KONTRAKAN

10 orang lebih dari 12 rumah. Ditip Rp 90 juta Rp 135 juta. Ada 12 unit yang dijual. Penggrubungi dan juga penggrubungi.

Sumber: Berlanga Informasi

Tak Setor Retribusi, 26 Jukir Kena Tegur

SIDOARJO

- Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo menindak tegas juru parkir (jukir) yang tidak memenuhi kewajiban menyetorkan retribusi. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 26 jukir telah menerima surat peringatan (SP) karena tidak menyetorkan uang parkir sesuai ketentuan.



PEMBINAAN: Para jukir dikumpulkan di GOR Delta Sidoarjo untuk menjalani pengajaran, Jumat (16/10).

Peringatan diberikan seiring banyaknya jukir yang tidak menyerahkan uang parkir. Ada 476 jukir yang masih memiliki tunggakan ke Pemkab. Nilainya Rp 900 juta.

Kepala UPT Parkir Dishub Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan, pemberian surat peringatan dilakukan secara bertahap berdasarkan pelanggaran yang ditemukan. Jukir yang tidak memperbaiki pelanggaran dapat menerima peringatan

lanjutan hingga tiga kali sebelum akhirnya diberhentikan. "Kami masih mengedepankan pendekatan persuasif," kata Fajar.

Dia menjelaskan, sistem kerja sama dengan jukir dalam mengelola parkir baru tahun ini berjalan. Sebelumnya, pengelolaan parkir di Kota Delta dilakukan oleh pihak ketiga. Karena itu, Dishub masih memberikan kesempatan kepada

para jukir untuk memperbaiki kepatuhan terhadap aturan, terutama terkait kewajiban menyetorkan retribusi parkir.

Tak hanya soal setoran, Dishub juga menyortir sejumlah pelanggaran lain di lapangan. Di antaranya penggunaan karcis yang tidak sesuai ketentuan, jukir yang tidak menyerahkan karcis kepada pengguna jasa, hingga pemanfaatan area parkir di luar batas yang ditetapkan. Penertiban dilakukan untuk memastikan para jukir menjalankan tugas sesuai aturan. (ful/hen)

Imbang 3-3, Subandi Apresiasi Mental Baja Pemain

KOTA-Deltara FC Sidoarjo

menunjukkan mental bertanding yang tangguh saat menemu Pesisir Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS). Minggu (18/10) sore. Meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-22, The Lobster mampu mengamankan hasil imbang 3-3 hingga pertandingan berakhir.



SUPPORTER: Bupati Sidoarjo Subandi (tiga dari kanan) hadir langsung menyaksikan pertandingan Deltara vs Pesisir Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Salah satu kunci bagi Deltara untuk menang adalah pemain muda yang menjadi modal utama.

Dalam sepekan ini, Subandi mengatakan, sistem kerja sama dengan jukir

tidak membuat pemain cepat berpasir. Sebaliknya, hasil positif tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas permainan.

Jadikan pencapaian saat ini sebagai motivasi untuk terus berkembang.

Yang terpenting, semangat dan kekompakan tim terus terjaga," tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh elemen tim, mulai pemain, pelatih, manajemen hingga supporter, untuk terus berenergi menjaga konsistensi performa Deltara. Dukungan bersama dinilai penting agar target kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional dapat terwujud. "Kami semua masyarakat harus mendukung Deltara FC kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional," ungkapnya.

Kehadiran Subandi bersama Ketua Umum KONI Sidoarjo di GDS sekaligus memberikan dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan olahraga. Khususnya sepak bola. (dik/vga)

Lapas Porong Panen 73 Kilogram Kangkung, Warga Binaan Dapat Premi

PORONG

Bukan sekadar menghasilkan sayuran untuk dipasarkan, kegiatan pertanian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya atau Lapas Porong, Sidoarjo, juga menjadi jalan bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan sekaligus memperoleh apresiasi atas hasil kerja mereka.

Dalam sepekan ini, Subandi mengatakan, sistem kerja sama dengan jukir

Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga belajar membangun etos kerja, tanggung jawab, dan kemandirian.

Menurutnya, pembinaan melalui sektor pertanian diharapkan mampu memberikan bekal yang bermanfaat bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Hasil panen tersebut akan digunakan untuk memenuhi pesanan yang telah masuk serta memasok kebutuhan masyarakat di Pasar Porong.

Kepala Lapas (Kapas) Kelas I Surabaya Sohibur Rachman menegaskan, kegiatan pertanian produktif tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi

warga binaan. Kami terus mendorong agar program pembinaan kemandirian tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi," ujar Sohibur, Senin (19/10).

Dia berharap, kegiatan pertanian tersebut dapat membantu warga binaan menjadi pribadi yang mandiri dan produktif setelah menyelesaikan masa pidana. (dik/vga)



ASPIRASI: Sosialisasi pokir-pokir (pokir) DPRD Sidoarjo di The Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bayar Rp 105 Juta, Pembeli Tak Tahu Rumah Berdiri di Aset Desa

Jaksa Usut
Alih Fungsi
TKD Damarsi

SIDOARJO - Penyelidikan kasus alih fungsi tanah kas desa (TKD) Damarsi jadi rumah kontrakan terus bergulir. Kejari Sidoarjo memanggil pembeli hunian petak di aset desa dan pemasok material bangunan kemarin (19/10). Ada keterangan baru yang didapat penyidik.

Salah seorang pembeli, Soehargono mengaku sudah

menyetor uang Rp 105 juta pada pengembang. Dia tak tahu jika hunian yang dibeli berada di TKD. Soehargono baru mengetahui setelah muncul demonstrasi warga akhir 2025.

"Saya sudah dua kali dipanggil. Penyidik bertanya soal proses jual beli rumah," kata Soehargono. Dia mengaku membeli lahan tersebut pada Januari 2024 melalui kantor notaris. Transaksi dilakukan menggunakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) lantaran tanah belum memiliki sertifikat



Rencana, ada saksi lagi yang akan diperiksa."

Sigit Sambodo
Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo

tersendiri dan masih berstatus sertifikat induk. Menurut Soehargono, pengembang menjanjikan pemecahan sertifikat setelah

seluruh unit terjual. Dia mengaku tidak menaruh curiga karena kantor perusahaan pengembang berada tepat di sebelah lahan yang kini dipersoalkan. "Saya juga bingung kalau memang bermasalah, kenapa selama hampir dua tahun dibiarkan? Tidak ada peringatan dari desa atau pengembang," ujarnya.

Soehargono menyebut, saat ini terdapat 12 rumah yang telah dihuni warga. Para pembeli, menurut dia, telah melunasi pembayaran dengan harga berkisar Rp 90 juta hingga Rp 135 juta per

unit. Mereka mengaku tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan TKD.

Dia meminta penyidik menelusuri proses penjualan lahan, termasuk meminta keterangan pengembang berinisial AN.

Kejari Sidoarjo juga kembali memanggil Huda, pemasok material pengurusan TKD kemarin. Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo membenarkan proses pemeriksaan masih akan berjalan. "Rencana, ada saksi lagi yang akan diperiksa," katanya. (eza/hen)



JADI SAKSI: Pembeli rumah Soehargono (kanan) bersama koordinator warga Damarsi Al Suwair keluar dari Kantor Kejari Sidoarjo kemarin (19/10).

MISTERI ASET DESA JADI RUMAH KONTRAKAN

TKD dibangun lebih dari 12 rumah	Dijual Rp 90 juta-Rp 135 juta	Ada 12 saksi yang diperiksa	Perangkat desa juga dipanggil penyidik
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Sumber: Berbagai Informasi

Jawa Pos

Terganjai Makam hingga Stasiun, FR Waru Belum Nyambung

SIDOARJO - Penyambungan frontage road (FR) Waru-Buduran masih menghadapi sejumlah kendala. Tiga titik belum bisa dituntaskan karena persoalan lahan di Kecamatan Waru. Mulai area makam Desa Kedungrejo, tanah di sekitar masjid wilayah Waru, hingga sisi timur Stasiun Waru.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, setiap titik memiliki persoalan berbeda. Salah satu kendala berada di area makam Desa Kedungrejo. Ruas sepanjang 250 meter itu belum bisa dilanjutkan karena persoalan lahan makam yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 1.500 meter persegi di Desa Bungurasih sebagai lokasi makam pengganti. Namun, rencana pemindahan ma-

kam itu masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah desa (pemdes), badan permusyawaratan desa (BPD), dan pihak terkait lainnya. "Kami masih proses negosiasi," ujar Makhmud.

Selain makam, hambatan juga terjadi di sisi selatan masjid di wilayah Waru. Lahan tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih ada persoalan terkait status sebagian tanah masjid. Pemkab masih berupaya mencari solusi agar pembangunan jalan tidak terus tertunda.

Sedangkan, titik ketiga berada di sisi timur Stasiun Waru. Pemkab masih berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penggunaan lahan untuk FR. Pembahasan juga mempertimbangkan rencana pengembangan jalur kereta api di kawasan tersebut. "Lahan timur Stasiun Waru masih proses koordinasi dengan PT KAI karena mereka ada rencana proyek jalur ganda," terangnya. (ful/hen)



BELUM TUNTAS: Relokasi Makam Kedungrejo di Waru untuk pembangunan FR masih menunggu penyelesaian lahan pengganti.

Jawa Pos

INFRASTRUKTUR



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TAK RATA: Simpang lima Krian yang bergelombang dikeluhkan pengendara karena berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Aspal Ambles di Simpang Lima Krian Bikin Pemotor Terjatuh

SIDOARJO – Kerusakan aspal di kawasan simpang lima Krian membahayakan pengguna jalan. Permukaan jalan yang ambles sepanjang 1,5 meter membentuk cekungan sedalam lebih dari lima sentimeter. Kerusakan jalan membuat pengendara terjatuh.

Warga sekitar, M. Rosbi mengatakan kerusakan aspal tersebut sudah terjadi dua bulan lalu. Insiden kecelakaan terjadi pekan lalu pada malam hari. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Balongbendo menuju Pasar Krian terjatuh setelah melintasi bagian jalan yang ambles. "Untung saat kejadian tidak ada truk yang melintas," imbuhnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo M. Makhmud mengatakan pihaknya akan mengecek kondisi jalan tersebut. (eza/hen)

Jawa Pos

Tak Setor Retribusi, 26 Jukir Kena Tegur

SIDOARJO – Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo menindak tegas juru parkir (jukir) yang tidak memenuhi kewajiban menyetorkan retribusi. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 26 jukir telah menerima surat peringatan (SP) karena tidak menyetorkan uang parkir sesuai ketentuan.

Peringatan diberikan seiring banyaknya jukir yang tidak menyerahkan uang parkir. Ada 476 jukir yang masih memiliki tunggakan ke Pemkab. Nilainya Rp 900 juta.

Kepala UPT Parkir Dishub Sidoarjo Fajar Rusdiono



PEMBINAAN: Para jukir dikumpulkan di GOR Delta Sidoarjo untuk menjalani pengarahannya, Jumat (16/10).

mengatakan, pemberian surat peringatan dilakukan secara bertahap berdasarkan pelanggaran yang ditemukan. Jukir yang tidak memperbaiki pelanggaran dapat menerima peringatan

lanjutan hingga tiga kali sebelum akhirnya diberhentikan. "Kami masih mengedepankan pendekatan persuasif," kata Fajar.

Dia menjelaskan, sistem kerja sama dengan jukir

dalam mengelola parkir baru tahun ini berjalan. Sebelumnya, pengelolaan parkir di Kota Delta dilakukan oleh pihak ketiga. Karena itu, Dishub masih memberikan kesempatan kepada

para jukir untuk memperbaiki kepatuhan terhadap aturan, terutama terkait kewajiban menyetorkan retribusi parkir.

Tak hanya soal setoran, Dishub juga menyoroti sejumlah pelanggaran lain di lapangan. Di antaranya penggunaan karcis yang tidak sesuai ketentuan, jukir yang tidak menyerahkan karcis kepada pengguna jasa, hingga pemanfaatan area parkir di luar batas yang ditetapkan. Penertiban dilakukan untuk memastikan para jukir menjalankan tugas sesuai aturan. (ful/hen)

Jawa Pos

Tiga SPPG Sidoarjo^V Diduga Gunakan Sertifikat Laik Abal-abal

SIDOARJO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menemukan dugaan penggunaan tiga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu oleh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dokumen tersebut tidak ditemukan dalam sistem resmi saat dilakukan pengecekan oleh petugas ■

Baca Tiga... Hal 19



M. SAIFUL ROHMAN/JAWA POS

TEMUKAN PELANGGARAN: Forkopimda Sidoarjo bersama BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di Sidoarjo kemarin (19/10).

Jawa Pos

✓ Tiga SPPG Sidoarjo Diduga Gunakan Sertifikat Laik Abal-abal

Sambungan dari hal 13

Kepala Dinkes Sidoarjo Lakshmie Herawati Yuwan-tina mengatakan, dugaan itu diketahui setelah pihaknya menerima laporan dan memeriksa dokumen yang diserahkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Ketika disampaikan kepada kami, kemudian kami cek pada sistem,

tidak muncul seperti yang seharusnya ada di sistem kami," kata Lakshmie kemarin (19/10).

Ia menduga ada oknum yang memanfaatkan kebutuhan pengelola dapur MBG untuk menawarkan dokumen SLHS yang tidak sesuai ketentuan. "Kami hanya menyampaikan kepada pengelola SPPG bahwa dokumen-

nya tidak sesuai. Terkait kemungkinan pelaporan ke kepolisian, saya serahkan kepada pengelola karena mereka yang menjadi korban," ujarnya.

Sementara itu, dari total 153 SPPG di Sidoarjo, masih ada tujuh yang belum mengantongi SLHS. "Seluruh dapur MBG memiliki sertifikat tahun ini," tegasnya. (ful/gal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MENYEBERANG: Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condoputra turun langsung ikut mengatur arus lalu lintas di kawasan pertigaan Pucang.

Hari Pertama Menjabat, Kapolresta Turun Atur Lalu Lintas

KOTA-Mengawali hari pertama bertugas, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condoputra turun langsung ke jalan untuk melayani masyarakat melalui program Pagi Melayani, Senin (19/10). Ia ikut mengatur arus lalu lintas di kawasan Taman Pinang Indah dan lampu lalu lintas pertigaan Pucang, Sidoarjo Kota.

Bobby mengatakan, kehadiran polisi di jalan raya merupakan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama pada jam sibuk pagi hari. Pengaturan lalu lintas dilakukan untuk membantu kelancaran perjalanan warga yang hendak bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas lainnya.

"Melalui program Pagi Mela-

yani ini, kami ingin memastikan kehadiran anggota Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Kami berupaya membantu kelancaran lalu lintas sehingga masyarakat dapat memulai aktivitas dengan aman dan nyaman," ujarnya.



Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh jajaran Polresta Sidoarjo, termasuk personel kepolisian sektor (polsek) di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tugas ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus kendaraan sekaligus mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada pagi hari.

Menurut Bobby, pelayanan kepolisian tidak hanya diwujudkan melalui penegakan

● Ke Halaman 10



Hari Pertama...

hukum, tetapi juga dengan kehadiran langsung anggota Polri di tengah aktivitas masyarakat. Melalui langkah tersebut, polisi diharapkan semakin dekat dengan warga dan mampu

memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengimbau para pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. "Kami mengajak seluruh masyarakat

untuk tertib berlalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dengan kedisiplinan bersama, kami berharap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga," pungkasnya. (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pokir DPRD Diperketat, Harus Selaras Visi Bupati

■ Pendampingan untuk Memahami Mekanisme

KOTA-Usulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo bakal disaring lebih ketat. Setiap usulan anggota dewan harus mengacu pada kamus usulan yang diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo.

Kebijakan ini bertujuan memastikan program yang diusul-

kan tidak sekadar mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil), tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi pelaksanaan pokir DPRD Sidoarjo bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di The Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10) pagi.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar usulan

pokir dapat diproses sesuai ketentuan. Terlebih, penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2028 mulai dipersiapkan.

Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo telah menginstruksikan sekretaris daerah (sekda) untuk menggunakan kamus usulan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, setiap usulan memiliki acuan yang jelas dan tidak menyimpang

● Ke Halaman 10



ASPIRASI: Sosialisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo di The Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10).



Pokir DPRD Diperketat...

dari arah kebijakan pemerintah daerah. "Alhamdulillah, kita sosialisasi pokok-pokok pikiran dari teman-teman DPRD untuk menyamakan persepsi. Kita sudah memerintahkan sekda terkait penggunaan kamus usulan sebagai dasar merancang perencanaan tahun 2028," ujarnya.

Subandi menjelaskan, kamus usulan tersebut disusun dengan mengacu pada visi dan misi bupati. Karena itu, usulan yang tidak sesuai dengan acuan tersebut berpotensi tidak dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Dia meminta sekretaris DPRD (sekwan) dan jajaran perencanaan Pemkab Sidoarjo aktif mendampingi anggota dewan, terutama legislator yang baru menjabat. Pendampingan diperlukan agar mereka memahami mekanisme pengajuan pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

"Jangan sampai teman-teman DPRD yang baru belum memahami apa itu SIPD dan pokir. Akhirnya hanya mengusulkan, tetapi tidak sesuai dengan kamus usulan sehingga tidak terakomodasi," jelasnya.

Subandi juga menekankan penting-

nya kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan pokir. Menurut dia, pengawasan terhadap usulan aspirasi semakin diperketat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Karena itu, dia mengajak seluruh pihak menjalankan mekanisme sesuai aturan agar program pembangunan yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Harapan kita, mari bersama-sama menjalankan regulasi dan membangun Kabupaten Sidoarjo. Pokok-pokok pikiran ini harus bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo

Abdillah Nasih mengatakan, sosialisasi tersebut juga bertujuan memastikan pengajuan pokir berjalan tertib secara administrasi. Anggota dewan harus memperhatikan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan agar aspirasi masyarakat dapat masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dia menjelaskan, usulan pokir tetap bersumber dari aspirasi masyarakat di masing-masing dapil. Namun, aspirasi tersebut perlu diselaraskan dengan visi dan misi bupati serta kebutuhan prioritas Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penanganan banjir, pengelolaan sampah, pembangunan

infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Program-program yang diprioritaskan berasal dari aspirasi dapil, kemudian kita bandingkan dengan visi dan misi bupati serta pekerjaan rumah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Semuanya bergantung pada kebutuhan dan aspirasi masing-masing dapil," kata Nasih.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD dan Pemkab Sidoarjo diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun pokir. Dengan begitu, usulan yang diajukan tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga mendukung prioritas pembangunan daerah. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kejari Periksa Pemasok Material dan Penghuni Kos

■ Kasus Lahan TKD Damarsi

KOTA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terus mendalami dugaan persoalan lahan tanah kas desa (TKD) di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran yang kini berdiri bangunan rumah kos dan telah dihuni warga. Sejumlah pihak dimintai keterangan, mulai dari pemasok material pengurukan hingga penghuni yang mengaku telah membeli rumah di lokasi tersebut. ● Ke Halaman 10



PENYELIDIKAN: Salah seorang saksi se usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.



Kejari Periksa Pemasok...

Salah satu saksi yang menjalani pemeriksaan adalah Huda, pemasok material untuk pekerjaan pengurukan lahan. Se usai pemeriksaan di Kejari Sidoarjo, Senin (19/10), dia mengaku mengetahui sejumlah aktivitas di lokasi, tetapi menegaskan tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah.

"Saya hanya menyuplai material untuk pengurukan. Kalau terkait jual beli lahan, saya bukan pihak yang melakukan transaksi," kata Huda.

Menurut Huda, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembelian lahan tersebut dilakukan dengan persetujuan kepala desa dan pihak pengembang, Agus Nasroni. Namun, dia mengaku tidak mengetahui adanya

dokumen tertulis yang membuktikan persetujuan tersebut.

"Transaksinya atas dasar kepercayaan dan persetujuan pihak desa. Kalau bukti tertulisnya, saya tidak ada," ujarnya.

Huda juga mengaku mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan perpindahan patok batas lahan. Menurut dia, kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan acara kenduri yang dihadiri kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sejumlah perangkat desa.

"Setelah acara selesai, pihak desa pulang membawa berkat dan amplop. Itu juga sudah saya jelaskan secara rinci saat pemeriksaan sebelumnya," ungkapnya.

Dia menyebut pemeriksaan terbaru masih berkaitan dengan keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya. Meski demikian, penyidik mengajukan

sejumlah pertanyaan tambahan untuk mendalami persoalan lahan yang kini telah dibangun rumah kost tersebut.

Sementara itu, salah seorang penghuni rumah kost, Soeharsono, mengaku kembali dimintai keterangan oleh Kejari Sidoarjo. Pemeriksaan tersebut merupakan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya pada Juli 2026.

Soeharsono mengatakan membeli rumah di lokasi tersebut pada Januari 2024 melalui transaksi di kantor notaris Yanuar. Saat transaksi, dia mengaku menerima dokumen berupa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), bukan akta jual beli (AJB), karena tanah tersebut belum bersertifikat.

"Saya membeli Januari 2024, transaksinya di kantor notaris Pak Yanuar. Dokumennya perjanjian jual beli karena belum ada sertifikat," kata Soeharsono.

Dia mengaku saat itu meyakini tran-

saksi yang dilakukan tidak bermasalah. Keyakinan tersebut didasarkan pada keberadaan kantor perusahaan penjual lahan yang berada di sebelah lokasi serta tidak adanya peringatan maupun pengegelan yang diketahuinya selama hampir dua tahun.

"Saya berpikir kalau memang bermasalah, kenapa selama hampir dua tahun dibiarkan? Tidak ada peringatan, tidak ada pengegelan," ujarnya. (sur/vga)





LAPAS KELAS I SURABAYA

PRODUKTIF: Panen kangkung di Lapas Porong Sidoarjo.

Lapas Porong Panen 73 Kilogram Kangkung, Warga Binaan Dapat Premi

PORONG-Bukan sekadar menghasilkan sayuran untuk dipasarkan, kegiatan pertanian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya atau Lapas Porong, Sidoarjo, juga menjadi jalan bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan sekaligus memperoleh apresiasi atas hasil kerja mereka.

Dalam sepekan terakhir, program pertanian di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) berhasil menghasilkan 73 kilogram kangkung.

Hasil panen tersebut selanjutnya dipasarkan untuk memenuhi pesanan yang telah masuk serta memasok kebutuhan sayuran di Pasar Porong.

Kepala Lapas (Kapas) Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan, kegiatan pertanian produktif tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi

warga binaan.

Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya mendapatkan keterampilan praktis, tetapi juga belajar membangun etos kerja, tanggung jawab, dan kemandirian.

Menurutnya, pembinaan melalui sektor pertanian diharapkan mampu memberikan bekal yang bermanfaat bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

"Kami terus mendorong agar program pembinaan kemandirian tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi," ujar Sohibur, Senin (19/10).

Dia berharap, kegiatan pertanian tersebut dapat menumbuhkan semangat warga binaan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan produktif setelah menyelesaikan masa pidana. (dik/vga)

✓ Pemain Tak Bisa Kendalikan Emosi

SIDOARJO, SURYA - Deltras FC harus bermain dengan 10 pemain dalam dua pertandingan terakhir. Kartu merah menjadi penyebab The Lobster harus kehilangan pemain sebelum pertandingan berakhir.

Saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Minggu (18/10), Deltras kehilangan Shulton Fajar yang mendapat kartu merah di menit 22. Bermain dengan 10 pemain, Deltras harus tertahan imbang 3-3 oleh Persis.

Sebelumnya, Deltras juga bermain dengan 10 pemain saat menantang Persela di Stadion Surajaya, Lamongan pada 11 Oktober lalu. Deltras harus kehilangan Ananta Krisna sejak menit 37. Dalam laga pekan 5 Championship 2026/2027 ini Deltras tertahan imbang 1-1 oleh Persela.

Pelatih Deltras, Leonard Tupamahu mengatakan dua pertandingan terakhir menjadi tantangan berat bagi The Lobster karena harus bermain dengan jumlah pemain yang tidak lengkap. "Ini sangat berat karena ini kedua kalinya kami ber-

main dengan 10 pemain," ujar Leo.

Leo menyebut situasi itu menjadi bahan evaluasi penting bagi timnya. Leo minta para pemain belajar dari kesalahan yang terjadi, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial yang membutuhkan kedisiplinan dan konsentrasi tinggi.

Menurutnya, pemain harus mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan tim dan memengaruhi hasil pertandingan. "Pemain harus belajar, terutama dalam partai-partai penting seperti ini. Kami mulai dengan 11 pemain, berakhir juga harus dengan 11 pemain," tambahnya.

Pelatih asal Jakarta ini juga menyoroti tindakan pemain yang berpotensi mengarah pada pelanggaran tidak sportif. Leo berharap pemain segera menghilangkan kebiasaan tersebut agar Del-

tras tidak kembali kehilangan pemain akibat kartu merah. "Pemain harus belajar dan harus tahu cara main yang keras tapi tidak terlalu kasar," imbuhnya. (amn/lib)

**LEONARD
TUPAMAHU**



DOK./ILEAGUE



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS DEWAN

Hibah di Pamekasan Macet 2 Tahun, Komisi IV Datang ke Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan melakukan sharing terkait penyaluran dana hibah yang macet kepada Pemkab Sidoarjo. Pasalnya, selama dua tahun terakhir dana hibah di Pamekasan belum bisa dicairkan. Saat ini pencairannya masih menunggu petunjuk Bupati.

Ketua Komisi IV Kabupaten Pamekasan, Yasin Halili, mengatakan tahun 2027 pun kemungkinan belum bisa dicairkan. Sebab ada atensi dari KPK sehingga hibah untuk masjid, musala, dan yayasan tidak bisa dicairkan.

“Bisa tidak bagus kalau terus tidak bisa dicairkan, sebab banyak masyarakat yang pasti sudah menunggu,” ujarnya, Senin (19/10) kemarin, saat kunjungan kerja bersama eksekutif di Delta Karya Setda Sidoarjo.

Dampaknya juga cukup serius. Kabag Kesra Pamekasan sampai-sampai juga dikabarkan mengundurkan diri kepada Bupati Pamekasan dan saat ini diganti Plt.

“Kami ditelepon terus oleh konstituen, mereka harap ada pencairan dana hibah,” katanya.

Selama ini di Pamekasan, hibah untuk masjid dialokasikan sebesar Rp20 juta, musala Rp10 juta, dan yayasan Rp40 juta. Menanggapi hal itu, Plt Kabag Kesra Sidoarjo, Abdul Muid, mengatakan nilai hibah di Pamekasan hampir sama dengan di Kabupaten Sidoarjo. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Biru Dajud Biru Wadud

Imbang 3-3, Subandi Apresiasi Mental Baja Pemain

KOTA-Deltras FC Sidoarjo menunjukkan mental bertanding yang tangguh saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS), Minggu (18/10) sore. Meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-22, The Lobster mampu mengamankan hasil imbang 3-3 hingga pertandingan berakhir.

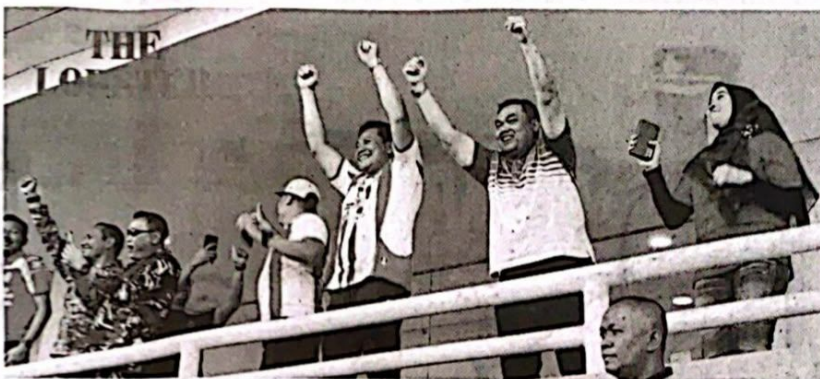
Semangat pantang menyerah para pemain mendapat apresiasi dari Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir langsung menyaksikan pertandingan. Dia datang bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Kota Delta tersebut.

Subandi menilai, perjuangan Deltras patut diapresiasi. Bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit bukan perkara mudah, tetapi para pemain tetap mampu memberikan perlawanan sengit hingga peluit akhir dibunyikan.

Menurut dia, hasil imbang melawan Persis Solo bukan sekadar tambahan satu poin. Hasil tersebut juga menunjukkan karakter, kekompakan, dan daya juang tim yang menjadi modal penting dalam mengarungi kompetisi Liga 2 Championship 2026/2027.

"Seluruh pemain tetap bekerja keras, tidak menyerah, dan terus berjuang sampai peluit akhir dibunyikan," ujar Subandi.

Dia berharap semangat tersebut terus dipertahankan dalam pertandingan berikutnya. Konsistensi permainan dinilai menjadi



SUPORTER: Bupati Sidoarjo Subandi (tiga dari kanan) hadir langsung menyaksikan pertandingan Deltras vs Persis Solo di stadion Gelora Delta Sidoarjo.

salah satu kunci bagi Deltras untuk bersaing di papan atas klasemen sekaligus menjaga peluang promosi ke Liga 1.

Tambahan satu poin dari laga tersebut mengantarkan Deltras untuk sementara memuncaki kla-

semen Grup B. Posisi ini menjadi modal berharga bagi tim untuk menjaga peluang meraih tiket promosi, meski persaingan masih akan berlanjut hingga akhir kompetisi.

Subandi mengingatkan agar capaian sementara itu

tidak membuat pemain cepat berpuas diri. Sebaliknya, hasil positif tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas permainan.

"Jadikan pencapaian saat ini sebagai motivasi untuk terus berkembang.

Yang terpenting, semangat dan kekompakan tim terus terjaga," tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh elemen tim, mulai pemain, pelatih, manajemen hingga supporter, untuk terus bersinergi menjaga konsistensi performa Deltras. Dukungan bersama dinilai penting agar target kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional dapat terwujud.

"Kami semua masyarakat Sidoarjo tentu ingin melihat Deltras FC kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional," ungkapnya.

Kehadiran Subandi bersama Ketua Umum KONI Sidoarjo di GDS sekaligus menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan olahraga, khususnya sepak bola. (dik/vga)